

# KEPASTIAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN TERHADAP PENYIMPANGAN TATA KELOLA APBDES (STUDI PADA PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 55 TAHUN 2023)

Yunita Dwi Ratnasari

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H, LL.M.

## ABSTRAK

Upaya pencegahan penyimpangan tata kelola APBDes melalui implementasi Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2023 yang mewajibkan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada tingginya angka kasus korupsi di sektor desa dengan modus operandi membawa anggaran desa secara tunai oleh kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pencegahan terhadap penyimpangan tata kelola APBDes yang diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2023 dan konsekuensi terhadap penerapan APBDes yang tidak diberlakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan didukung data empirik dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sistem transaksi non tunai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 sebagai instrumen pencegahan terhadap penyimpangan tata kelola APBDes dan sebagai kepastian hukum yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui aplikasi CMS (*Cash Management System*). Namun masih terdapat celah dalam substansi norma hukum yang belum mengatur mekanisme penyetoran pajak secara non tunai. Selain itu terdapat bentuk baru penyimpangan yaitu dengan melakukan transfer langsung ke rekening milik kades dan perangkat desa serta melakukan transaksi tanpa melengkapi dokumen surat perintah pembayaran (SPP). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak. Praktik penyimpangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan pengembalian kerugian keuangan desa dalam kurun waktu 60 hari setelah muncul laporan hasil pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci : APBDes, *Good Governance*, Kepastian Hukum, Pencegahan, Pengawasan, Penyimpangan, Transaksi non tunai.

*LEGAL CERTAINTY IN PREVENTING DEVIATIONS IN APBDDES  
MANAGEMENT (A STUDY OF MOJOKERTO REGENT  
REGULATION NUMBER 55 OF 2023)*

Yunita Dwi Ratnasari

*Master of Law Study Program, University of Surabaya*

*Contributor : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H, LL.M.*

*ABSTRACT*

*Efforts to prevent irregularities in the management of the Village Budget through the implementation of Mojokerto Regent Regulation Number 55 of 2023 which requires non-cash transactions in village financial management are based on the high number of corruption cases in the village sector with the modus operandi of carrying village funds in cash by the village head. This study aims to examine the mechanism for preventing irregularities in the management of the Village Budget as regulated in Mojokerto Regent Regulation Number 55 of 2023 and what are the consequences of the implementation of the Village Budget that is not implemented in accordance with Regent Regulation Number 55 of 2023. This study uses a normative method with a statutory approach and is supported by empirical data from the field. The results of the study indicate that the non-cash transaction system regulated in Regent Regulation Number 55 of 2023 as an instrument for preventing irregularities in the management of the Village Budget and as legal certainty is expected to be able to increase transparency and accountability as a form of realization of the principles of good governance in managing the Village Budget through the CMS (Cash Management System) application. However, there are still gaps in the substance of legal norms that do not yet regulate the mechanism for non-cash tax payments. Furthermore, new forms of irregularities have emerged, including direct transfers to village heads' and village officials' accounts, and transactions without completing payment order documents (SPP). Therefore, strengthening regulations and increasing the capacity of village officials is an urgent need. These irregularities can result in administrative consequences and require the restitution of village financial losses within 60 days of the audit report, as stipulated in Government Regulation Number 12 of 2017 concerning the Development and Supervision of Regional Government Administration and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 73 of 2020 concerning the Supervision of Village Financial Management.*

*Keywords: Village Budget, Good Governance, Legal Certainty, Prevention, Supervision, Deviations, Non-cash Transactions.*